

DINAMIKA KRISIS EKONOMI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN KRISIS 1998 DAN KRISIS COVID 19 TAHUN 2020

Faadhilatu Rahmatillah¹, Hasanah², Muhamad Sides³
Pendidikan Ekonomi, Universitas Pamulang, Banten
E-mail: *faadhilaturahmatillah@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbandingan krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998 dan krisis akibat pandemi COVID-19 tahun 2020, dengan tujuan mengidentifikasi penyebab, dampak, dan strategi penanganan masing-masing krisis. Menggunakan metode studi literatur, kajian ini menemukan bahwa krisis 1998 dipicu oleh ketidakseimbangan makroekonomi dan spekulasi pasar, sedangkan krisis 2020 disebabkan oleh gangguan global akibat penyebaran virus COVID-19 yang memukul hampir seluruh sektor ekonomi. Dampaknya mencakup peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan instabilitas fiskal. Studi ini juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip ekonomi Islam, seperti distribusi kekayaan yang adil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebagai solusi alternatif yang berkelanjutan dalam menghadapi krisis ekonomi nasional.

Kata kunci

Krisis Ekonomi, Indonesia, Krisis keuangan 1998, Pandemi Covid-19, Kebijakan Fiskal

ABSTRACT

This study discusses the comparison between Indonesia's economic crisis in 1998 and the crisis caused by the COVID-19 pandemic in 2020, aiming to identify the causes, impacts, and response strategies of each crisis. Using a literature study method, the research finds that the 1998 crisis was triggered by macroeconomic imbalances and market speculation, while the 2020 crisis resulted from a global disruption due to the spread of COVID-19, which severely affected almost all economic sectors. The impacts include rising unemployment, poverty, and fiscal instability. This study also highlights the importance of applying Islamic economic principles, such as fair wealth distribution and community economic empowerment, as sustainable alternative solutions in addressing national economic crises.

Keywords

Economic crisis, Indonesia, 1998 monetary crisis, COVID-19 pandemic, fiscal policy

1. PENDAHULUAN

Hampir 30 tahun kinerja ekonomi Indonesia sangat baik dari tahun 1970 hingga pertengahan 1997. Pada tahun 1993, Indonesia, bersama dengan Malaysia dan Thailand, dimasukkan ke dalam kategori "Ekonomi Baru Kemajuan" (NIEs). Inflasi terkendali turun dari sekitar US\$ 100 pada tahun 1970 menjadi US\$ 1.014 pada tahun 1996, menurunkan tingkat kemiskinan dari sekitar 60% menjadi 11%. Di sisi lain, PDB riil tetap tumbuh sekitar 8%.

Krisis ekonomi yang luas berkembang menjadi krisis nilai tukar rupiah pada tengah tahun 1997. Rupiah terdepresiasi lebih dari 70% pada tahun 1998, mencapai puncaknya pada Juli 1998 ketika mencapai Rp. 14.700 per US\$. Produk domestik bruto tumbuh 4,7 persen pada tahun 1997, tetapi turun 13,1 persen pada tahun 1998. Inflasi rata-rata hanya 8,2% dari 1991 hingga 1996. Namun, pada tahun 1998, naik tajam menjadi 77,6%, sebagian besar karena produk yang bagus di pasar internasional. Karena tidak dapat menghentikan kenaikan tajam permintaan domestik, Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI satu bulan menjadi 70% pada Juli 1998. Pada tahun 1998, impor barang konsumsi turun 34% dan ekspor minyak mentah turun 36%.

Ekonomi Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 1998 dengan penurunan pertumbuhan sebesar 13,1%. Sejak itu, pertumbuhan telah pulih, tetapi dampaknya masih kuat.

kehidupan masyarakat. Efek Transformasi besar dalam struktur ekonomi, sosial, politik, dan budaya adalah faktor utama yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Perubahan ini adalah yang paling signifikan dalam sejarah modern Indonesia, tetapi juga membuat pemulihan ekonomi lebih sulit.

Krisis ekonomi pada tahun 1998, secara global hampir sama dengan krisis covid 19 cuma berbeda penyebab, kondisi dan cara mengatasinya. Selama hampir dua tahun, pandemi COVID-19 telah melanda seluruh dunia. Virus ini terus berkembang dan menyebar, memaksa semua orang untuk beradaptasi dengan era new normal. Ini terjadi pada akhir tahun 2019, ketika dunia dikejutkan dengan berita bahwa virus corona terdeteksi, yang bermula dari Kota Wuhan di Tiongkok. Virus ini sekarang mengancam masyarakat secara keseluruhan. Hampir seluruh sektor industri terkena dampak virus, dan ekonomi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus Corona, atau COVID-19, sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Setelah pemberitahuan tersebut,

pasar bergejolak dan perdebatan di bidang politik, keuangan, pendidikan, ekonomi, dan pasar modal muncul. Pandemi COVID-19 menimbulkan kekhawatiran tentang prospek masa depan. Penurunan juga terkena sebagai akibat dari masalah ini. investasi, masalah sosial seperti meningkatnya angka pengangguran dan tingkat kriminalitas, sehingga Saat memilih kebijakan ekonomi, setiap negara menghadapi kontroversi dan kesulitan.

Berdasarkan yang disebutkan di atas, pertanyaan yang akan dibahas oleh peneliti adalah: apa yang menyebabkan krisis ekonomi tahun 1998 dan selama pandemi COVID-19, bagaimana krisis ekonomi tahun 1998 dan selama pandemi, dan bagaimana krisis ekonomi tahun 1998 dan selama pandemi diatasi.

2. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode studi literatur atau studi pustaka untuk mengumpulkan informasi dan data untuk analisis. Penelitian literatur adalah metode penelitian yang melibatkan analisis dan analisis artikel, jurnal, buku, dan temuan penelitian dari berbagai sumber yang terkait dengan subjek penelitian. "Studi pustaka adalah upaya yang sering dilakukan untuk menemukan data, mengumpulkan data, dan menganalisis secara mendalam guna memecahkan suatu masalah" (Samuel, 2018). Penulis menggunakan informasi primer dan sekunder. 1) Data primer adalah data yang dimasukkan ke dalam laporan penelitian dan dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian.

Menurut Arikunto (2014), ini adalah data yang diambil secara langsung dari responden melalui jawaban mereka pada kuesioner atau wawancara. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber media audio visual, penulis penelitian ini menggunakan data awal ini untuk siswa dan hasil penelitian yang diambil dari jurnal-jurnal yang membahas masalah tersebut. sumber data utama. Jurnal 2) Data tertulis, seperti buku, surat kabar, artikel, dan dokumen, digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk mendukung dan mendukung data primer.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data editing, atau pemeriksaan kembali data yang telah mereka peroleh sebelum melakukan penelitian Mengidentifikasi (mengorganisasikan) dan mengorganisasikan (mengorganisir data).

Untuk mendapatkan hasil penelitian, penyusunan, pengurutan, dan pengorganisasian data dikenal sebagai analisis data. Penulis menggunakan berbagai metode analisis data. Mereka memulai dengan pendekatan komperatif, di mana mereka membuat kesimpulan dengan membandingkan data dari jurnal yang dikaji. Selanjutnya, penulis menganalisis data interpretatif, yang berarti mereka menyimpulkan pengalaman penelitian setelah analisis data. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan deduktif untuk membuat kesimpulan yang umum menjadi khusus, dan terakhir, penulis

menggunakan pendekatan induktif untuk membuat kesimpulan tentang fakta yang ada di lapangan yang khusus menjadi umum tentang dinamika krisis ekonomi Indonesia: studi perbandingan krisis ekonomi tahun 1998 dengan krisis COVID-19 tahun 2020.

3. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyebab

Krisis ekonomi, dalam kata-kata para ekonom, terjadi ketika warga suatu negara tidak lagi mempercayai pemerintahnya, terutama jika menyangkut masalah keuangan. Bank-bank yang ada saat ini menghadapi krisis likuiditas karena nasabah tidak lagi memilih untuk menyimpan uang di bank tersebut. Dalam hal ini, bank sentral akan mengurangi nilai kepemilikannya untuk menyelamatkan setiap bank. Setelah itu, ketika bank mengumpulkan kelebihan uang tunai, harga-harga meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah uang tunai di masyarakat. Jika hal ini terjadi, krisis akan melanda.

Utang negara tersebut jauh lebih besar dibandingkan PDB-nya karena negara tersebut tidak mampu melakukan pembayaran atas utang tersebut, pada kejadian krisis lainnya, krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 menjadi contoh nyata dalam kegagalan pasar yang berdampak serius terhadap perekonomian nasional. Kejadian tersebut mendorong pemerintah untuk segera mengambil peran aktif. Salah satu cara untuk mengatasi dampak krisis adalah dengan memberikan pendanaan untuk menstabilkan perekonomian dan meningkatkan ekonomi negara secara keseluruhan. Namun, apakah pendanaan yang diberikan untuk membantu para pelaku ekonomi terutama ditujukan untuk bank yang telah kolaps.

Ini menunjukkan bahwa dana ini berasal dari dana rakyat yang dikumpulkan melalui penarikan pajak dan sumber dana lainnya. Akibatnya, peristiwa penting yang terjadi pada masa itu dapat menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak pernah menikmati hasil sistem ekonomi pasar harus membayar kegagalan kapitalisme sebagai dasar pasar (Hamid, 2009).

Para ahli ekonomi juga sepakat bahwa krisis ekonomi yang sedang terjadi pada tahun 1997-1998 disebabkan oleh penularan dari negara Thailand yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan makro. Terdapat tiga faktor utama menurut Putri Kuemala Sari dan Fakhruddin (2016), yaitu fundamental makro ekonomi, kapitalis medan kepanikan serta penularan kebijakan di Asia Timur yang termasuk didalamnya Indonesia.

Indonesia yang juga ikut terdampak oleh krisis tersebut mengalami pelemahan tajam pada nilai tukar rupiah. Situasi ini dilanjutkan dengan utang luar negeri swasta, yang menyebabkan tekanan besar pada sektor eksternal, terutama terjadinya mengalami overshooting nilai tukar dolar AS yang jauh melebihi nilai wajarnya. Selain itu, aksi spekulatif yang secara terus menerus terhadap dolar AS (spekulasi) serta jatuh tempo utang swasta luar negeri dalam jumlah besar membuat krisis ini berkepanjangan lebih lama. Krisis semakin kompleks akibat akumulasi berbagai faktor dari beragam sektor yang turut memperburuk keadaan.

Mereka memiliki efek yang besar. Antara lain, konflik pemerintah-masyarakat pada tahun 1998, banyaknya PHK yang menyebabkan sekitar 14 juta orang menganggur, penurunan nilai tukar dari Rp4.000 menjadi Rp16.000, dan banyaknya PHK yang menyebabkan penurunan nilai tukar.

Menurut Puri dan Amaliah (2021) menyatakan bahwa Lebih dari 70% perusahaan pasar modal hancur akibat krisis 1998, yang menghancurkan ratusan bisnis, dari

perusahaan kecil hingga konglomerat besar. tidak sengaja mengalami bangkrut. Sejak akhir tahun 60-an, kondisi ini telah meningkatkan perbedaan antara pekerja dan pengangguran hingga 20%, atau sekitar 20 juta orang. Akibatnya, jumlah orang miskin terus bertambah. Pada tahun 1998, sekitar 5% populasi global hidup dalam kemiskinan. Pemerintah saat ini berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah krisis serupa seperti yang terjadi pada tahun 1998 karena dampaknya yang besar.

Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis ekonomi menurut Miralda,dkk (2024)

a. Tingkat Inflasi yang Tinggi

Kenaikan harga barang dan jasa yang berkepanjangan dikenal sebagai inflasi. Karena bergantung pada tinggi rendahnya % inflasi, maka inflasi pada umumnya tidak selalu berdampak negatif. Namun, nilai mata uang suatu negara akan menurun dan perekonomian akan memburuk jika peristiwa ini sering terjadi dan dalam kecepatan tinggi.

b. Utang Negara Terlalu Tinggi

Jumlah utang pemerintah yang berlebihan merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya krisis ekonomi. Keadaan ini setara dengan suatu bisnis yang memiliki hutang. Anda pada akhirnya akan bangkrut jika tidak mampu melakukan pembayaran.

c. Pembangunan Ekonomi yang Stabil

Pertumbuhan ekonomi yang terhambat atau terbelakang dalam suatu negara merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap krisis ekonomi. Kemungkinan suatu negara mengalami krisis meningkat seiring dengan laju ekspansi ekonominya.

Sementara penyebab dari krisis covid-19 yaitu karena adanya Sejak virus COVID-19 menyebar di seluruh dunia, banyak masalah sedang dihadapi, menyebabkan kelumpuhan di banyak bidang, termasuk ekonomi. Apabila penurunan terus berlanjut, kondisi ekonomi akan terus memburuk hingga krisis dan resesi ekonomi terjadi.

Karena penyebaran COVID-19, negara-negara mungkin memberlakukan kebijakan restriksi atau social distancing yang lebih ketat, dan ketidakpastian yang tinggi meningkatkan tekanan pada pasar keuangan global. Akibatnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 dapat dikurangi. Akibatnya, setiap perusahaan terhambat dan mengalami kemunduran terus menerus.

Banyak sektor, seperti pariwisata, transportasi, UMKM, pakaian, dan manufaktur, sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Sejak Januari 2020, industri pariwisata mengalami penurunan wisatawan sebesar 30,42%. Wisata halal dan industri perhotelan lainnya juga menurun. Di tengah pandemi COVID-19, 1.266 hotel telah ditutup di 31 provinsi Indonesia. Selain itu, wahana rekreasi, acara, dan biro perjalanan semuanya mengalami penurunan sebesar 90 persen, 84 persen, dan 30 persen masing-masing. Industri fashion muslim juga mengalami penurunan sebesar 30 persen. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan warga negara. Pandemi COVID-19 membuat angka kemiskinan di Indonesia meningkat dari 9,15% menjadi 9,59%, dengan 3,78 juta orang diperkirakan menjadi korban tindak pidana yang merugikan masyarakat seperti penjangbretan, begal, pencurian, dan tindak pidana lainnya.

Sosial distancing membatasi kemampuan orang untuk bergerak. Solusi adalah menerapkan strategi distribusi islam secara virtual dan digital. pembayaran zakat, wakaf, infak, waris, dan sedekah secara digital, serta pembayaran gaji melalui payroll dan sistem aplikasi untuk kerja sama. Produk inovatif diperlukan untuk mengimbangi kebutuhan yang terus berubah akibat pandemi COVID-19.

3.2 Kondisi Krisis Ekonomi

Sebenarnya, krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997-1998 adalah bagian dari krisis finansial Asia yang lebih besar, yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak efektif dan tindakan pasar keuangan global yang mengerikan. Kombinasi ini menyebabkan inflasi sekitar 70% dan kebangkrutan bagi banyak bisnis, terutama yang memiliki pinjaman AS. Ini juga menyebabkan pemecatan massal, yang menyebabkan pengangguran yang sangat tinggi.

Krisis ekonomi selalu berdampak pada neraca perdagangan; ini berlaku baik untuk krisis moneter maupun global, di mana pertumbuhan ekspor negara-negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia malah melemah, mengakibatkan penurunan daya beli domestik negara-negara tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan neraca perdagangan menjadi lebih buruk.

Krisis 1998 menyebabkan ratusan bisnis runtuh, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Hariyanto (2020). Sekitar 70% perusahaan di pasar modal mengalami kebangkrutan tak terduga. Setelah itu, tingkat pengangguran meningkat ke tingkat yang belum pernah terlihat sejak akhir tahun 60-an. Ini mencakup sekitar dua puluh juta orang, atau 20% dari populasi yang bekerja. Akibatnya, angka penduduk miskin terus meningkat. Pada tahun 1998, sekitar 25% populasi global hidup di bawah ambang kemiskinan. Pemerintah saat ini berusaha sekuat tenaga untuk menghindari bencana 1998.

Meskipun suku bunga Indonesia naik 28,29% pada tahun 1998, rupiah turun dari Rp 4.650,00 menjadi Rp 8.025,00, menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga tidak selalu mengurangi suku bunga yang berlaku di Indonesia, termasuk suku bunga deposito. Karena dolar lebih aman daripada rupiah, orang lebih suka menyimpan uang dalam dolar meskipun suku bunga mungkin lebih tinggi. Suku bunga deposito di Indonesia akan menjadi

Sebaliknya, menurut Andriyani, I., & Armereo, C. (2016) menyatakan Neraca perdagangan Indonesia dipengaruhi oleh tingkat bunga deposito, yang merupakan representasi dari tingkat bunga domestik; tingkat bunga tersebut berdampak negatif pada neraca transaksi berjalan. Jumlah uang yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan meningkat ketika suku bunga simpanan meningkat, tetapi orang juga dapat mendorong untuk menyimpan lebih banyak uang di lembaga keuangan.

pinjam meningkat dan biaya produksi pada sektor riil meningkat, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan tingkat bunga simpanan.

Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 memberikan pukulan keras terhadap stabilitas fiskal negara. Komara (2020). Pemerintah Indonesia, seperti banyak negara lain, menghadapi tekanan besar karena harus menyeimbangkan kebutuhan belanja tinggi dengan penurunan pendapatan negara. Saat pandemi melanda, penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan, mengalami penurunan drastis. Aktivitas ekonomi melambat, banyak usaha berhenti beroperasi, dan angka pengangguran meningkat, yang berdampak langsung pada turunnya penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Di sisi lain, belanja negara justru meningkat tajam. Pemerintah harus menyediakan anggaran besar untuk sektor kesehatan, termasuk pengadaan alat kesehatan, vaksinasi massal, pembangunan rumah sakit darurat, dan insentif bagi tenaga medis. Selain itu, dana besar juga dialokasikan untuk bantuan sosial seperti program sembako, bantuan langsung tunai (BLT), subsidi UMKM, dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Hal ini membuat beban APBN membengkak dan defisit fiskal tak terhindarkan. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah mengambil langkah dengan melakukan

pinjaman luar negeri dan menerbitkan surat utang negara. Langkah ini dianggap sebagai solusi jangka pendek agar negara tetap memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan program-program pemulihan. Meski demikian, pinjaman ini menambah beban bunga dan kewajiban pembayaran utang di masa mendatang, sehingga pengelolaan fiskal harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan. Sebenarnya, kerugian negara akibat pandemi bisa dikompensasi dalam jangka panjang melalui peningkatan pendapatan pajak dan non-pajak ketika ekonomi pulih.

Saat aktivitas ekonomi mulai berjalan normal kembali, sektor swasta bangkit, konsumsi meningkat, dan lapangan kerja kembali terbuka (Wagiraharjo, S. 2022). maka penerimaan negara juga akan ikut meningkat. Dalam kondisi ideal, negara bisa mencapai titik impas, di mana kerugian selama pandemi tertutupi oleh pendapatan pasca-pandemi. Namun, asumsi ini sangat bergantung pada efisiensi dan integritas dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Jika dalam pelaksanaannya terdapat kebocoran anggaran, korupsi, atau penyalahgunaan dana, maka kerugian negara akan membengkak dan tidak akan bisa ditutupi hanya dengan mengandalkan peningkatan penerimaan. Korupsi terhadap dana-dana darurat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik akan memperparah beban fiskal dan menghambat proses pemulihan.

Raz et al. (2012) membahas teori utang dan ketidakstabilan keuangan, yang menyatakan bahwa peningkatan ekonomi diikuti oleh periode pertumbuhan yang positif dan negatif, yang menghasilkan peningkatan utang dan pengambilan risiko yang berlebihan, yang berpotensi memicu terbentuknya gelembung aset dan berujung pada kontraksi ekonomi ; 2) teori *disaster myopia*, menjelaskan bahwa persaingan ketat diantara lembaga keuangan mendorong mereka untuk mengabaikan kredibilitas peminjam dan meremehkan resiko, sehingga menciptakan ketidakstabilan sistem keuangan; dan 3) teori bank run, yaitu ketika investor panik dan menjual atau menarik dana mereka secara massal karena khawatir tentang kondisi ekonomi yang akan memburuk, yang dapat menyebabkan krisis likuiditas dan penurunan harga aset yang signifikan.

Selain kerugian negara, dampak ekonomi pandemi juga terasa kuat di tingkat perusahaan dan individu. Banyak perusahaan, terutama UMKM, mengalami kerugian karena tidak ada pemasukan akibat penurunan permintaan. Sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi, dan ritel mengalami penurunan omzet yang signifikan. Dalam banyak kasus, perusahaan terpaksa melakukan PHK atau merumahkan karyawan, yang memperburuk tingkat pengangguran dan kemiskinan. Individu juga menanggung beban besar dari krisis ini. Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Banyak keluarga yang terjerumus dalam kemiskinan ekstrem, tidak bisa membayar cicilan, sewa rumah, atau biaya pendidikan anak. Hal ini menciptakan efek domino terhadap daya beli masyarakat dan menurunkan kualitas hidup secara umum. Untuk menutupi kebutuhan hidup, sebagian individu dan pelaku usaha terpaksa mengambil pinjaman. Sayangnya, bunga pinjaman yang tinggi serta ketidakpastian penghasilan membuat mereka kesulitan membayar kembali utang tersebut. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kebangkrutan personal maupun korporat, memperbesar risiko kredit macet di lembaga keuangan, dan akhirnya memperlebar krisis ke sektor perbankan. Pemerintah berupaya menanggulangi dampak ini dengan program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, serta pelatihan kewirausahaan bagi korban PHK. Namun, dampaknya belum sepenuhnya merata, terutama karena keterbatasan data dan akses terhadap program bantuan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi memerlukan

sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan perlindungan sosial yang inklusif dan tepat sasaran.

3.3 Mengatasi kondisi krisis ekonomi

Untuk mengatasi permasalahan di atas, dibutuhkan strategi untuk mengembalikan perekonomian di masa pandemi COVID-19 telah memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Sektor mengalami penurunan produktivitas, pengangguran meningkat, dan daya beli masyarakat melemah. Situasi ini memunculkan berbagai tantangan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan solusi berkelanjutan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu pendekatan yang relevan untuk diterapkan adalah konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Dalam Islam, aspek moral dan spiritual menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Anshori, S. (2016), manusia bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap sesama. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosial, serta distribusi kekayaan yang merata untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam yang dapat dijadikan strategi pemulihan ekonomi adalah sistem distribusi. Distribusi dalam pandangan Islam tidak hanya berorientasi pada mekanisme pasar bebas, melainkan lebih kepada prinsip keadilan dan kepatutan. Konsep distribusi Islam merupakan penyaluran harta yang dimiliki, baik secara pribadi maupun umum, kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas ekonomi antarumat.

Prinsip utama dalam distribusi Islam adalah bagi hasil kekayaan atau dikenal dengan sistem profit and loss sharing. (Srisusilawati, P., & Eprianti, N. 2017). Dengan sistem ini, kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga mengalir kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bertujuan agar terjadi pemerataan ekonomi dan tidak ada penumpukan harta pada kelompok tertentu. Islam juga menentang praktik ribawi yang hanya menguntungkan satu pihak dan membebani pihak lain, karena hal tersebut akan merusak tatanan keadilan ekonomi yang ingin dibangun. Dalam praktiknya, distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya dilakukan melalui instrumen ibadah sosial seperti zakat dan sedekah, tetapi juga melalui mekanisme bisnis yang adil dan transparan. Misalnya, melalui kerja sama usaha seperti musyarakah dan mudharabah, di mana kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional.

Sistem ini memungkinkan terjadinya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil tanpa harus terjebak pada utang berbunga tinggi yang membebani mereka. Mekanisme distribusi yang ditawarkan oleh Islam juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah krisis. Ketika masyarakat yang kurang mampu diberdayakan melalui dana sosial Islam, mereka akan memiliki akses terhadap modal, pelatihan, dan peluang usaha. Dengan begitu, roda perekonomian akan terus berputar dan daya beli masyarakat meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan yang menjadi sumber konflik sosial. Secara keseluruhan, penerapan konsep distribusi dalam ekonomi Islam merupakan langkah strategis dalam upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Sistem ini tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan aspek keadilan dan kesejahteraan

masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu mulai melirik dan mengembangkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dalam merespons krisis ekonomi. Dengan semangat solidaritas, keadilan, dan keberkahan, ekonomi Islam diyakini mampu menjadi solusi jangka panjang bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Soeseno Bong, M. M. (2019). Penanganan krisis ekonomi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai akar penyebab krisis agar langkah-langkah penanganan yang diambil tepat sasaran dan efektif. Dalam konteks Indonesia, krisis ekonomi telah beberapa kali terjadi dan masing-masing memiliki penyebab yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengkaji kembali sejarah krisis yang pernah terjadi guna menyusun strategi penanggulangan yang lebih matang dan berkelanjutan. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 merupakan salah satu yang paling parah dalam sejarah Indonesia. Krisis tersebut dipicu oleh berbagai faktor seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, tingginya suku bunga, memburuknya rasio pembayaran utang luar negeri, serta meningkatnya inflasi.

Menurut Sitorus, A. P dkk (2022) dampak dari krisis ini sangat luas, mulai dari runtuhnya banyak perusahaan besar, meningkatnya angka pengangguran, hingga terjadinya instabilitas sosial dan politik. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bahwa kestabilan sektor keuangan sangat menentukan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, krisis global tahun 2008 juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia, meskipun tidak separah tahun 1998. Krisis ini lebih banyak disebabkan oleh penurunan indeks harga saham secara drastis, inflasi yang tidak terkendali, serta suku bunga yang tidak stabil atau cenderung tinggi.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan masyarakat sehingga menurunkan tingkat konsumsi dan investasi Vanani, A. B., & Suselo, D. (2021). Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, 7(2). Situasi ini membuktikan bahwa faktor eksternal seperti pasar modal global juga memiliki pengaruh besar terhadap kestabilan ekonomi nasional. Dengan memahami berbagai penyebab krisis di masa lalu, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih proaktif dan antisipatif. Analisis terhadap faktor-faktor seperti nilai tukar, suku bunga, inflasi, dan utang luar negeri menjadi penting untuk dilakukan secara berkala. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara lembaga keuangan, otoritas fiskal, dan sektor riil agar tercipta kebijakan yang holistik dan saling mendukung.

Ketahanan ekonomi tidak hanya dibangun melalui kekuatan pasar, tetapi juga melalui perencanaan dan pengelolaan risiko yang matang. Secara keseluruhan, pengkajian terhadap penyebab krisis ekonomi di masa lalu merupakan langkah penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Krisis memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, namun dampaknya bisa diminimalkan jika ada kesiapan dan strategi yang tepat. Zebua, M. (2023). Pemerintah harus terus melakukan riset, simulasi kebijakan, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional agar dapat lebih tahan terhadap guncangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan begitu, Indonesia dapat memiliki sistem ekonomi yang lebih stabil dan berdaya saing di masa depan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 dan krisis akibat pandemi COVID-19 tahun 2020 memiliki dampak

multidimensional terhadap perekonomian nasional, meskipun berbeda dalam pemicu dan konteksnya. Krisis 1998 dipicu oleh ketidakstabilan moneter dan lemahnya fondasi ekonomi, sementara krisis COVID-19 dipicu oleh gangguan sektor kesehatan yang melumpuhkan hampir seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak keduanya mencakup peningkatan pengangguran, kemiskinan, serta penurunan tajam produktivitas sektor riil dan fiskal negara. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah Indonesia memperkuat sistem ketahanan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti distribusi yang adil dan pengelolaan dana sosial, serta peningkatan literasi dan inovasi ekonomi berbasis digital untuk memperkuat daya tahan masyarakat terhadap potensi krisis di masa depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, I., & Armereo, C. (2016). Pengaruh suku bunga, inflasi, nilai buku terhadap harga saham perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Orasi Bisnis: Jurnal Ilmiah Administrasi Niaga*, 15(1).
- Anshori, S. (2016). Kontribusi ilmu pengetahuan sosial dalam pendidikan karakter. *Eduksos Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 3(2).
- Hamid, E. S. (2009). Akar Krisis Ekonomi
- Hariyanto, E. (2020). *Mewaspada Terulangnya Krisis Ekonomi 1998 & Upaya Pencegahannya*. @ jualinbukumu.
- Komara, B. D., Setiawan, H. C. B., & Kurniawan, A. (2020). Jalan terjal UMKM dan pedagang kecil bertahan di tengah pandemi Covid-19 dan ancaman krisis ekonomi global. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3), 342-359.
- Maharani, Y., & Marheni, M. (2022). Strategi kebijakan dalam mengatasi krisis ekonomi di masa pandemi covid-19:(studi kasus indonesia). *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 17(02), 234-244.
- Maulidia, D. N., Kurniawan, M. R., & Yasin, M. (2023). Faktor-faktor krisis dan dampak krisis yang pernah terjadi di Indonesia sehingga mengakibatkan kerapuhan fundamental. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 181-193.
- Michael Christian & Firman Hidayat. Dampak Coronavirus Terhadap Ekonomi Global.
- Nafi'Hasbi, M. Z. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 385-400.
- Puri, N. Y., & Amaliah, I. (2021, December). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, PDB, Nilai Tukar dan Krisis Ekonomi terhadap Neraca Perdagangan Indonesia Periode 1995-2017. In *Bandung Conference Series: Economics Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 9-19).
- Purwanto, Erwin Agus, Wahyudi Kumorotomo, Ambar Widaningrum, Wawan Mas'udi, and Azifah R. Astrina. "Problematika Kebijakan Krisis COVID-19 di Indonesia." *Policy Brief* (2020).
- Raz, A. F., Indra, T. P., & Artikasih, D. K. (2012). Krisis keuangan global dan pertumbuhan ekonomi: Analisa dari perekonomian Asia Timur. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 15(2), 37-56.
- Salsyabillah, M., Azaddin, T. Z. A., & Batubara, M. (2024). KRISIS EKONOMI DI INDONESIA: PENYEBAB, DAMPAK DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(6).
- Samuel, R., Natan, R., & Syafiqoh, U. (2018). Penerapan cosine similarity dan K-Nearest Neighbor (K-NN) pada klasifikasi dan pencarian buku. *Journal of Big Data Analytic and Artificial Intelligence*, 4(1), 9-14.

- Sari, P. K., & Fakhruddin, F. (2016). Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 377-388.
- Sitorus, A. P., Majid, M. S. A., & Handayani, R. (2022). Krisis Keuangan Masa Depan dan Sistem Keuangan Baru. *Jurnal Emt Kita*, 6(1), 136-146.
- Soeseno Bong, M. M. (2019). Manajemen risiko, krisis, dan bencana untuk industri pariwisata yang berkelanjutan. Gramedia pustaka utama.
- Soleha, A. R. (2020). Kondisi UMKM masa pandemi covid-19 pada pertumbuhan ekonomi krisis serta program pemulihan ekonomi nasional. *EKOMBIS: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 6(2).
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12-23.
- Syahbana, J. S. A., Setyawati, Y., & Yasin, M. (2024). Menganalisis Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Tingkat Ekonomi Makro. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 242-250.
- Vanani, A. B., & Suselo, D. (2021). Determinasi Resesi Ekonomi Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(2).
- Wagiraharjo, S. (2022). *PERBANDINGAN KONDISI PERUSAHAAN DISAAT NORMAL, PANDEMI COVID-19 DAN UU CIPTA KERJA OMNIBUS LAW TERKAIT DENGAN AKTIVITAS PERUSAHAAN* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Wijoyo, H., & Widiyanti, W. (2020). Digitalisasi umkm pasca pandemi covid-19 di riau. *Prosiding Konferensi Nasional Administrasi Negara Sinagara*, 12.
- Yose Rizal Damuri & Fajar B. Hirawan. (2020). Mengukur Dampak COVID-19 pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020.
- Zebua, M. (2023). *STRATEGI MANAJEMEN KRISIS SEBAGAI PROSES PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN KRISIS (STUDI KASUS PADA STAF OPERASI KODAM XIV/HASANUDDIN)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Zubaidah, T., Yenriani, Y., Putri, F. H., & Pangastuti, N. (2021). Krisis ekonomi bangsa Indonesia dimasa pandemi covid-19. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2), 216-223.